

Surat Kabar : KOMPAS

Edisi : 9 Desember 2014

Subyek : SUMBER DAYA ALAM

Hal : 14

SUMBER DAYA ALAM : ANCAMAN KETIDAKADILAN SEMAKIN NYATA

Ketidakadilan ekologi berupa perampasan sumber daya alam yang merupakan ruang hidup masyarakat lokal oleh korporasi kian marak. Negara yang seharusnya menjamin keadilan absen, bahkan aparaturnya hampir selalu memihak korporasi. Sementara dampak kerusakan lingkungan ditanggung masyarakat luas. Praktik-praktik ketidakadilan ekologi itu dipaparkan wakil masyarakat Rembang, Jawa Tengah, yang bersengketa dengan PT Semen Indonesia (SI) pada diskusi di Program Studi Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (UI), di Jakarta, Senin (8/12). Selain itu, dihadirkan masyarakat Bali penolak reklamasi Teluk Benoa dan masyarakat adat Baduy.

Ketua Program Studi Filsafat UI Saras Dewi mengatakan, acara itu bentuk tanggung jawab kampus kepada masyarakat. "Kampus harus bersikap terhadap penderitaan masyarakat. Jelas ada ketidakadilan sosial dan ekologi. Dan, sebagai lokus perubahan sosial budaya, kami harus bersikap. Kami mengecam penambangan yang merusak, juga mengecam kaum intelektual yang membela pihak yang membayar," katanya.

Sukinah, petani Desa Tegaldowo, Rembang, mengatakan, "Kami menolak pabrik semen di Pegunungan Kendeng karena mengancam tanah dan pekerjaan tani. Negeri ini katanya kaya, tapi mengimpor beras dan kedelai? Seharusnya pangan dinomorsatukan," ujarnya. Setengah tahun ini, ia dan puluhan perempuan berkemah di pintu masuk lokasi pembangunan pabrik PT SI. Menurut Sukinah, kerusakan lingkungan karena penambangan akan luas. Pegunungan Kendeng sumber air masyarakat Rembang dan Blora. Acara kemarin memutar video kekerasan terhadap sejumlah perempuan penghadang truk dan alat berat PT SI, 26 November 2014. Pada film itu, sosok berseragam polisi memukul seorang perempuan.

"Saya korban kekerasan aparat polisi itu. Padahal, saya hanya ingin mempertahankan lesung dan luku (alat pertanian) yang diambil paksa," kata Murtini.

Sementara Wayan Perak dari Desa Kedonganan, Kuta, menceritakan perlawanan warga desanya atas rencana reklamasi Teluk Benoa. "Kalau tetap diuruk hingga 700 hektar, pasti mengancam kehidupan nelayan. Dampak lingkungannya tak hanya bagi desa kami, pasti meluas hingga ke desa lain," ungkap Wayan.

Kedonganan salah satu desa di kawasan Teluk Benoa seluas 1.373 hektar. Tak hanya mengancam kehidupan nelayan, reklamasi dikhawatirkan juga mematikan sumber pendapatan warga yang bertumpu pada restoran ikan laut. "Kami penolak reklamasi terus diteror," ujarnya.

Peran negara dipersoalkan

Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup, membahas diskusi, mengatakan, "Kita butuh semen, tapi siapa yang membolehkan 600.000 orang yang tergantung pada Pegunungan Kendeng menanggung dampak tambang?" Ia menggugat ketidaktransparanan kebutuhan semen dalam negeri. "Jelas tujuan utama maraknya pembangunan pabrik semen akhir-akhir ini untuk ekspor," ujarnya. "Kasus Rembang ini akhirnya sama dengan rencana penggusuran nelayan di Teluk Jakarta untuk proyek tanggul laut raksasa dan reklamasi Teluk Benoa. Negara yang memihak korporasi untuk mengeksploitasi sumber daya alam berlebihan." Padahal, kata Abetnego, sepanjang 2013, bencana ekologis akibat kerusakan lingkungan naik 300 persen dan berdampak pada 6.700 desa. "Kebakaran hutan di Sumatera Selatan dan sekitarnya yang merugikan negara Rp 50 triliun menunjukkan negara yang akhirnya menanggung kerugian. Yang untung segelintir pelaku usaha perkebunan," katanya.

Menurut dosen Filsafat UI, Rocky Gerung, tren perusakan lingkungan oleh korporasi menguat seiring pemahaman yang dibenarkan sebagian akademisi dan agamawan bahwa alam dihadirkan untuk dikuasai manusia. Lalu, seolah-olah alam bisa dieksploitasi habis-habisan. Oleh karena itu, perlu perubahan pola pikir secara mendalam. (AIK).

